PENDAPAT AKHIR
FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
TERHADAP
RANCANGAN QANUN ACEH
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH TAHUN ANGGARAN 2021

Bismillahirrahmaanirrahim,

Assalamu'alaikum Wr, Wb.

Alhamdulillahi Rabbil'alamin, Wassalatu Wasalamu'ala Asyrafil Ambia-i Walmursalin. Wa'ala alihi Washahbihi Ajma'in.

Marilah kita mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat hadir pada rapat paripurna Masa Persidangan DPR Aceh tahun 2020 dalam rangka penyampaian Pendapat Akhir Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh terhadap Rancangan Qanun Aceh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2021.

Shalawat beriring salam, sama-sama kita sampaikan ke haribaan junjungan alam, Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa risalah Islam, sebagai jalan kebenaran dan pedoman hidup bagi kita sekalian.

Yang kami hormati (disesuaikan),

- *Saudara Ketua, Para Wakil Ketua dan Anggota DPR Aceh;*
- *Saudara Gubernur Aceh;*
- *Saudara Anggota Forkopimda Aceh atau yang mewakili;*
- *Saudara Sekretaris Daerah, Para Asisten, Staf Ahli, Para Kepala SKPA dan Kepala Biro;*
- *Saudara Sekretaris Dewan dan seluruh pegawai secretariat;*
- *Saudara rekan-rekan pers, baik cetak maupun elektronik;*
- *Hadirin-hadirat yang kami muliakan;*

Mengawali penyampaian Pendapat akhir Fraksi Partai Amanat Nasional ini, izinkan kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah bekerja keras, demi menuntaskan penyusunan dan pembahasan terhadap program kegiatan dalam Rancangan Qanun Aceh tentang R-APBA Tahun Anggaran 2021.

Kerja keras yang telah kita laksanakan bersama dalam proses sinkronisasi penuntasan pembahasan R-APBA Tahun Anggaran 2021 ini, semata-mata bertujuan untuk menjaga kesinambungan pembangunan yang terencana dan sistematis oleh masing-masing maupun seluruh komponen Pemerintah Aceh, dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir meningkatkan kesejahteraan Rakyat Aceh.

Sidang Dewan yang terhormat
Hadirin Yang Kami Muliakan,

Untuk memastikan terwujudnya efektivitas pembangunan di daerah guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan Nasional tahun 2021, diperlukan sinergi perencanaan program kerja tahunan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan antar Pemerintah Daerah melalui Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA). Untuk mewujudkan sinergi perencanaan program kerja tahun Anggaran 2021, Pemerintah melalui Kementrian Dalam Negeri telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021, ketentuan perundang-undangan tersebut hendaknya menjadi perhatian kita bersama dalam rangka memenuhi tuntutan transparansi dan akuntabilitas atas pengelolaan keuangan.

Selain hal tersebut diatas, pemerintah harus terus berupaya mengikuti dinamika perkembangan berbagai aspek kehidupan maupun tuntutan masyarakat. Penyusunan dan pengelolaan anggaran yang baik dapat menjawab berbagai dinamika perkembangan dan tuntutan masyarakat itu sendiri, Selanjutnya, Kemendagri saat ini juga telah mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik dibidang pengelolaan keuangan daerah dalam bentuk sistem informasi keuangan daerah (SIKEUDA). Sistem ini bukan hanya berintegrasi pada level data, namun juga proses kerja *(work flow)*, pengelolaan keuangan dan asset pemerintah daerah. Tentunya Pemerintah Aceh sudah menerapkan sistem tersebut pada R-APBA Tahun Anggaran 2021 ini.

Dalam pembahasan anggaran yang telah kita laksanakan secara marathon dengan masing-masing SKPA, kami masih menemukan program/kegiatan yang belum seluruhnya tertuang dalam dokumen Rencana Kegiatan Anggaran (RKA), kami mengharapkan kepada Pemerintah Aceh untuk dapat di input seluruhnya dalam *Sistem Informasi Pemerintahan Daerah* (SIPD), untuk kedepan, dalam pengolaan *SIPD* antara eksekutif dan legislatif agar dapat bekerjasama lebih baik lagi, karena masih banyak keluhan dan kendala pada proses pengiputan penyusunan R-APBA Tahun Anggaran 2021 di dalam *SIPD*, seperti waktu penginputan yang tidak mempunyai jadwal konkrit, terkesan tiba-tiba dan tidak adanya alternative revisi pada aplikasi.

Sidang Dewan yang terhormat,

Pada kesempatan sidang Dewan yang terhormat ini, izinkanlah kami menyampaikan beberapa hal yang akhir-akhir ini sangat meresahkan di tengah-tengah masyarakat, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Fraksi Partai Amanat Nasional meminta untuk menjadi perhatian Pemerintah Aceh dan Aparat Penegak Hukum mengenai kondisi Aceh yang sudah bisa dikatakan sebagai *"daerah darurat narkoba",* hal ini seperti yang kita ketahui bersama dengan beberapa kali terjadi penangkapan transaksi narkoba baik yang masuk dari luar negeri maupun yang di produksi di Acehdalam jumlah yang sangat besar. Hari ini Aceh bukan lagi hanya sebagai tempat transit tapi sudah menjadi daerah target peredaran narkoba oleh jaringan Internasional. Kondisi yang mengkhawatirkan ini perlu menjadi perhatian kita bersama dalam upaya pencegahan kerusakan yang lebih luas kepada masa depan generasi muda Aceh.

2. Terhadap kemiskinan, pengangguran dan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh harus menjadi fokus dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh tahun 2017-2022. Yang menjadi persoalan Aceh pada saat ini adalah kemiskinan yang masih tinggi, kemudian pengangguran yang mendekati angka lebih kurang 7 persen, Selain itu pada tahun 2022 nanti Alokasi Dana Otsus yang diterima oleh Aceh juga akan berkurang dari 2 persen menjadi 1 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional, dan pada tahun 2027, dana Otsus Aceh akan berakhir jika tidak ada perpanjangan dari Pemerintah Pusat. Sementara disisi lain dalam struktur anggaran Aceh, Pendapatan Asli Aceh (PAA) masih sangat minim diangka 14 persen, sedangkan selebihnya masih didominasi transfer pusat baik itu Otsus, DAU, DAK dan Dana Bagi Hasil Migas. Semua pihak harus memberikan perhatian khusus kepada persoalan kemandirian keuangan sehingga kita bisa meningkatkan secara signifikan pendapatan Aceh kedepan, dan Pemerintah Aceh harus bersungguh-sungguh memikirkan secara serius potensi apa saja yang harus dioptimalkan dan direncanakan untuk bisa menjawab tantangan berat ini kedepan nantinya. Fraksi kami, fraksi Partai Amanat Nasional sangat khawatir, permasalahan ini akan menjadi persoalan besar kedepan bagi Aceh pasca berakhirnya dana Otsus.

   Kepada Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TKP2K) diharapkan untuk mencari sumber-sumber pendanaan lain serta harus memperhatikan keterkaitan dan keselarasan dengan Basis Data Terpadu (BDT) yang terbaru sebagai dasar rencana penanganan kemiskinan tahun 2021.

3. Banyak perusahaan swasta maupun Badan Usaha Milik Negara yang beroperasi di wilayah Aceh belum maksimal dalam menyalurkan dana CSR-nya guna membantu percepatan merealisasi program-program kerja Pemerintah Aceh. Kami meminta Pemerintah Aceh untuk tidak hanya menghimbau tetapi juga turun langsung ke perusahaan-perusahaan agar mereka dapat menyalurkan dana CSR-Nya, hal ini sangat penting dilakukan mengingat kondisi rakyat kita hari ini dalam kondisi yang sangat sulit ditengah-tengah pandemi Covid-19 yang belum kita ketahui kapan akan berakhir, bantuan dana CSR tersebut akan sangat membantu setidaknya untuk masyarakat dan lingkungan sekitar lokasi perusahaaan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat berupa layanan kesehatan, fasilitas pendidikan, pengembangan kepemudaan, pemberdayan UKM dan azas manfaat lainnya.

Sidang Dewan yang terhormat,

Sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, penyusunan anggaran dilakukan melalui pendekatan Anggaran Terpadu, Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM), dan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) dengan maksud sebagai berikut :

1. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan anggaran;
2. Adanya keterpaduan dan kesinambungan sistem penyusunan anggaran;
3. Adanya efektivitas dan efisiensi pemanfaatan dana yang tersedia;
4. Adanya transparansi dalam pelaksanaan anggaran.

Akhirnya, dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim*, Fraksi Partai Amanat Nasional Menyatakan Menerima Rancangan Qanun Aceh Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2021, dengan komposisi rincian sebagai berikut;

1) Pendapatan Aceh, sebesar	**Rp. 14.183.394.212.942,-**
2) Belanja Aceh, sebesar	**Rp. 16.990.469.972.136,-**
Surplus/(Defisit), sebesar	**Rp. (2.807.075.759.194,-)**
3) Pembiayaan Aceh:	
a). Penerimaan, sebesar	**Rp. 2.887.075.759.194,-**
b). Pengeluaran, sebesar	**Rp. 80.000.000.000,-**
Pembiayaan Netto, sebesar	**Rp. 2.807.075.759.194,-**

Setelah dengan memperhatikan Pendapat Badan Anggaran DPRA, Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRA dan juga setelah di Evaluasi oleh Mendagri, dan kemudian hasil dari Evaluasi Mendagri tersebut dibahas kembali secara bersama antara Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) dengan Badan Anggaran DPRA sebelum ditetapkan menjadi Keputusan Gubernur Aceh.

Sidang Dewan Yang Terhormat, Hadirin Yang Berbahagia

Demikian Pendapat Akhir Fraksi Partai Amanat Nasional terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2021, Mohon maaf apabila di dalam penyampaian ini ada hal yang tidak berkenan. Akhirnya, kepada Allah SWT kita berserah diri, semoga Yang Maha Kuasa selalu memberi rahmat dan karunia Nya kepada kita semua dalam menjalankan amanah rakyat ini. Amin ya rabbal alamiin. Kami akhiri dengan sebuah pantun:

Andaikan senyum sudah jadi kebiasaan

Hari-harinya wajah dihiasi muka menawan

Pandangan ini telah kami sampaikan

Sudi kiranya saudara Gubernur mempertimbangkan

Wabillahi Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum, Wr, Wb.

Banda Aceh, 30 November 2020

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

Ketua,	**Sekretaris,**
(Muchlis Zulkifli, ST)	**(Sofyan Puteh)**

1. **Fuadri, S.Si, M.Si**	**Wakil Ketua**
2. **Tezar Azwar, BSc.,M.Sc**	**Bendahara**
3. **Asrizal H. Aznawi**	**Anggota**
4. **Irfannusir, S.Ag.,SE.,M.IKom**	**Anggota**